

Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa¹

Amin Mudzakkir

Abstract

For most European countries, religious freedom is part of secularism principles to manage separation between public and private sphere. The right of citizens to believe and practice of religious faith, however, is not always synonymous with recognition from the state. In several countries, constitution guarantees religious freedom, but in some cases in European countries government has not yet been formally recognized the existence of Islam. In this context recognition is defined as recognition of organizations that represent religious community. The issue of representation is indeed very crucial, because this concerns distribution of public finances. Recognition of religious-based organizations means the state's willingness to subsidize religious activities.

The presence of migrants have made the issue of religious freedom is becoming more widespread in recent years. As the bulk of the migrants, Muslims are the most important subject in this issue. Prohibition of the use of religious symbols, including headscarves for Muslim women in public schools in France, has raised a number of questions about how far freedom of religion which based on secularism is practiced. Furthermore, questions about the meaning of secularism was critically raised back into the European public sphere. In fact, secularism is a political discourse that interpreted by various European countries. According to the observers, such diversity in the meaning of secularism is resulted come from the influence of dominant religious culture and political development of the nation-states project which is also different in each European country.

On the other hand, different interpretation of secularism is also linked with political dynamics of migration of European countries. Muslims in Europe as immigrant become the targeted group of integration policy. The problem of integration is not just include politics in public life, but also in the cultural area of private life. In this context, debate on multiculturalism emerged as a reaction to the assimilationist view which want to merge cultural boundaries of migrants to European community. Questions about how far the state should interfere in the cultural life, including those of religious practices, migrants, in this case the Muslim immigrants, is an important issue as a focus in this paper.

Keywords: secularism, Muslim, immigrants, Identity, Europe

1 Makalah dipresentasikan pada acara "1st Convention on European Studies in Indonesia" di Universitas Gadjah Mada, 16-18 March 2009

Pendahuluan

Di kalangan Muslim istilah sekularisme adalah “kata kotor” yang sering disamakan pengertiannya dengan sesuatu yang jahat, serakah, materialis, dan yang pasti, tidak islami (Noor, 2006). Akan tetapi hal ini tidak hanya terjadi di dunia Muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, kaum agamawan secara umum cenderung memandang sekularisme sebagai lonceng kematian bagi agama-agama. Di tempat lain, banyak sarjana ilmu sosial mempunyai pandangan yang hampir senada. Menurut mereka, sekularisme adalah wacana yang mendestraksi masyarakat dari kehidupan yang religius ke kehidupan yang serba materi. Dalam bahasa Weber, hasil akhir dari sekularisme ini adalah “*entzauberung der Welt*”, “hilangnya pesona dunia”. Inilah tipikal masyarakat modern yang dalam benak banyak orang, terutama di dunia Muslim, dinilai secara sinis dan cemas karena dikhawatirkan akan menantang keyakinan dan otoritas suci lembaga-lembaga keagamaan. Khususnya di dunia Muslim, jika “hilangnya pesona dunia” itu benar-benar terjadi, klaim bahwa Islam adalah “*kaffah*” yang meliputi agama dan negara (*al-Din wa al-Daulah*) akan terancam karena bertentangan dengan klaim totalitasnya itu sendiri. Padahal, diantara agama-agama besar monoteis, Islam adalah agama yang paling bertahan dengan klaim totalitasnya itu. Berbeda dengan Kristen, misalnya, yang secara doktrinal mempunyai pandangan yang lebih akomodatif terhadap sekularisme sebagaimana tercermin dalam sebuah ungkapan dalam Matthew 22: 21, yaitu: “*render unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's*” (“*memperssembahkan kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, dan kepada Allah hal-hal yang merupakan milik-Nya*”), Islam sepanjang sejarahnya justeru terlibat ketegangan yang terus menerus dalam mempertahankan pengaruh agama dalam kehidupan bernegara.

Meski demikian, kalau ditelaah lebih mendalam, problem hubungan antara agama dan negara tidak hanya milik dunia Muslim. Di Eropa, dimana sekularisme secara otomatis telah dianggap *embedded* dalam kultur masyarakatnya, problem hubungan antara agama dan negara masih tetap berlangsung. Dalam kenyataannya, makna sekularisme tidak pernah tunggal dan tidak pernah tetap. Masing-masing negara Eropa mempunyai interpretasi dan pengalaman berbeda-beda dalam hal bagaimana sekularisme diberlakukan. Tariq Modood dan Riva Kastoryano menyebut kultur keagamaan dan pengalaman politik yang berbeda-beda di masing-masing negara-negara Eropa sebagai penyebab mengapa interpretasi terhadap sekularisme tidak pernah seragam (Modood dan Kastoryano, 2006). Dari sini, lebih lanjut, kita bisa melihat bahwa sekularisme, selain merupakan fenomena yang selalu dikaitkan dengan eksistensi agama-agama, juga merupakan fenomena politik.

Dalam konteks Eropa, kehadiran kaum Muslim, yang sebagian besar adalah kaum migran, adalah kenyataan yang menantang masa depan sekularisme.

Usaha pemerintah di negara-negara Eropa untuk membatasi secara tegas mana wilayah agama dan mana wilayah negara seringkali berbenturan dengan keinginan kaum Muslim untuk mengekspresikan identitasnya dalam kerangka negara. Pada sisi lain, kebijakan integrasi terhadap kaum migran secara konsisten berusaha mendorong proses adaptasi, tidak hanya pada wilayah sosial ekonomi, tetapi juga pada wilayah kultural (Cesari, 2004). Pada wilayah yang disebut terakhir, pemerintah selalu mendorong proses akulturasi kaum migran ke dalam kultur *mainstream* Eropa yang berwatak sekuler. Proses akulturasi sesungguhnya bermakna sekularisasi. Usaha ini terus menerus dilakukan, karena bagi sebagian orang Eropa, ekspresi identitas Muslim adalah ancaman bagi konsensus politik sekuler. Kaum muslim, dalam banyak hal, dinilai sering melakukan “pengagamaan” (*religionize*) terhadap kehidupan politik. Penilaian yang skeptis seperti ini, dalam amatan Bikhu Parekh (2006), tampak terlalu dilebih-lebihkan dan sebagian besarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

Akan tetapi, peristiwa 11 September 2001 dan beberapa peristiwa tragis lain setelah itu, seperti peristiwa peledakan bom di Madrid pada 2004, dan di London pada 2005, telah melahirkan sikap “*Islamophobia*” yang luas di kalangan masyarakat Eropa—dan masyarakat Barat secara umum (van Bruinessen, 2005). Islam kemudian sering dikaitkan dengan berbagai teror dan aksi-aksi radikal yang menakutkan. Dalam diskusi akademis, kenyataan seperti ini seolah membenarkan tesis Huntington mengenai “*clash of civilizations*”. Negara-negara Barat tampak gentar. Berbagai kebijakan pun dirancang untuk menangani babak baru hubungan antara Barat dan dunia Muslim. Bagi negara-negara yang mempunyai problem dengan kaum migran Muslim, seperti negara-negara di Eropa, kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan semakin diperketat (Fetzer dan Soper, 2005). Multikulturalisme sebagai sebuah wacana dan model kebijakan yang awalnya didukung secara luas sekarang berada dalam tantangan. Oleh kaum ekstrimis kanan, multikulturalisme dipandang sebagai penyebab tumbuh suburnya bibit-bibit radikalisme di lingkungan kaum minoritas migran (De Master dan Le Roy, 2000; Akar, 2006; Vasta, 2007). Dalam konteks inilah, kaum Muslim Eropa sekarang berjuang menegosiasikan identitas keagamaannya di tengah lanskap politik baru itu.

Tulisan ini hendak mengeksplorasi beberapa isu yang muncul di sekitar wacana dan praktik sekularisme dan pengaruhnya terhadap persoalan identitas Muslim di Eropa. Dimulai dengan sebuah diskusi tentang problem agama dan negara di beberapa negara Eropa, tulisan ini akan melihat latar belakang historis dan sosiologis kaum Muslim Eropa sebagai kaum migran. Latar belakang seperti ini menjadi salah satu penjelasan terhadap dilema yang dihadapi kaum Muslim Eropa sebagai kaum minoritas, tidak hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai penutup, tulisan ini akan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang

bisa ditempuh untuk mendialogkan berbagai ketegangan yang muncul selama ini antara “Eropa” dan “Islam”.

Hubungan Agama dan Negara

Sekarang ini, sekularisme dianggap sebagai sebuah konsensus yang telah selesai dalam kehidupan masyarakat Eropa. Ini, tentu saja, tidak lahir secara tiba-tiba dalam sebuah ruang hampa, tetapi diperjuangkan dalam sebuah rentang sejarah yang penuh darah dan air mata. Secara historis, ide tentang sekularisme mulai mendapatkan tempatnya dalam kehidupan masyarakat Eropa sejak Perjanjian Westphalia ditandatangani pada 1648.² Sejak itulah sebuah kesadaran untuk membangun institusi politik yang semata dipersatukan oleh kepentingan duniawi muncul setelah orang-orang lelah karena perang atas nama agama yang berkepanjangan. Pelan-pelan kesadaran baru itu menggoncangkan keyakinan lama yang mendasarkan institusi politik pada otoritas iman. Para rahib di gereja-gereja gentar. Akhirnya kesadaran itu buncah di Perancis pada akhir abad ke-18 dalam sebuah revolusi paling penting dalam sejarah peradaban masyarakat Eropa – dan peradaban Barat secara keseluruhan. Revolusi Perancis, begitu nama revolusi penting itu disebut dalam buku-buku sejarah, mengakhiri sebuah hubungan yang saling menopang antara negara dan gereja, antara dunia politik dan dunia agama. Hubungan itu diputus dalam sebuah drama pemakzulan kekuasaan Raja Louis XVI. Itulah peristiwa politik yang hingar bingar oleh pekik emansipasi, tujuan tertinggi yang ingin dicapai manusia Pencerahan, yaitu. “memisahkan individu dari paksaan agama dan mengintegrasikan dirinya ke dalam komunitas politik sebagai warga negara perorangan” (Modood dan Kastoryano, 2006).

Sekularisme Eropa, yang lahir pertama kali di Perancis, adalah produk dari sebuah pengalaman historis yang khas. Dalam konteks tertentu, makna sekularisme di Eropa berbeda, misalnya, dengan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sekularisme didefinisikan sebagai “kebebasan beragama” (*freedom of religion*), sedangkan di Eropa istilah itu cenderung didefinisikan sebagai “kebebasan dari agama” (*freedom from religion*) (Jacoby dan Yavuz, 2008). Keputusan Eropa untuk benar-benar menepikan agama dari ruang publik, sebagaimana disebut di atas, dilatarbelakangi oleh pengalaman traumatis mereka di masa lalu. “Perselingkuhan” negara dan gereja melahirkan kekuasaan yang lalim. Reaksi yang lahir terhadap kekuasaan yang lalim itu adalah sebuah gerakan sekularisme yang galak. Sebagaimana terjadi di Perancis, sambil menumbangkan Raja Louis XVI, “kaum Republikan”,

2 Perjanjian Westphalia berisi rangkaian perjanjian yang mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) di kekaisaran Romawi dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Republik Belanda. Secara umum perjanjian ini mengatur pemisahan wilayah otoritas antara agama (gereja) dan negara (para raja) di Eropa. Perjanjian ini menjadi cikal bakal pembentukan negara-bangsa modern.

sebutan bagi para pendukung Revolusi Perancis, mengusir juga ribuan rahib Katolik dan bahkan sebagian diantaranya dibunuh. Inilah wajah paling keras dari sekularisme, sebuah gerakan yang berposisi secara radikal dengan lembaga-lembaga agama.

Interpretasi Perancis terhadap sekularisme dikenal dengan istilah *laicite*. Lebih dari sekadar bentuk pemisahan negara dan agama, *laicite* mengandung gagasan agar negara mendorong privatisasi agama dan penyebarluasan nilai-nilai sipil dalam kehidupan warga negara. Melalui sebuah konstitusi yang dibuat pada 1795, Perancis melakukan sekularisasi lembaga-lembaga pernikahan, kesehatan, dan pendidikan. Sejak itu, berbagai aspek kehidupan warga negara didasarkan semata-mata pada konsensus politik sekuler yang diisi dengan nilai-nilai sipil. Tidak heran kalau kemudian lahir leksikon-leksikon seperti berikut ini: *civil order*, *civil state*, *civil right*, *civil marriage*, *civil burial*, dan sebagainya. Interpretasi Perancis yang ketat terhadap sekularisme ditegaskan dalam konstitusi mereka pada tahun 1958. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa "Perancis adalah tak terpisahkan, sekuler (*laïque*), demokratis, dan Republik sosial. Ini menjamin kesetaraan bagi semua warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan asal, ras, dan agama. Semua keyakinan dihormati" (Modood dan Kastoryano, 2006).

Akan tetapi, dalam perkembangan lebih lanjut, pemaknaan terhadap *laicite* mengalami dinamika. Dalam amatan Fetzer dan Soper, terdapat paling tidak dua kelompok utama yang sama-sama memperebutkan pengaruh terhadap pemaknaan *laicite*, yaitu kelompok "*strict*" dan "*soft*" (Fetzer dan Soper, 2005). Kelompok pertama diisi oleh kalangan feminis, kaum "Republikan" kiri, dan persatuan para guru. Mereka, seperti sebutan yang diberikan oleh Fetzer dan Soper, memperjuangkan sebuah versi *laicite* yang ketat dan galak. Bagi mereka, apa yang sekarang diberlakukan di Perancis, tentang bagaimana seharusnya agama diatur dalam ruang publik, adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankan. Sebaliknya, kelompok kedua menafsirkan *laicite* secara lebih lunak. Bagi mereka, negara harus menghormati semua keyakinan beragama dan juga membantu mendanai program-program pengajaran agama di sekolah-sekolah swasta. Pendukung kelompok kedua ini berasal dari kalangan "multikulturalis kiri", beberapa pemimpin Kristen dan Yahudi, sebagian besar Muslim Perancis, dan para advokat hak asasi manusia.

Lebih lanjut, kelompok "*soft*" *laicite* mengkritik pendekatan Pemerintah Perancis yang dinilai intoleran terhadap ragam ekspresi identitas keagamaan. Bagi kelompok ini, identitas keagamaan adalah bagian dari "budaya", bukan hanya "agama". Masalahnya adalah, batas pengertian antara kedua wilayah tersebut sangat ambigu, karena alasan-alasan yang sifatnya teoritis dan politis (Kastoryano, 2006). Alasan seorang gadis Muslim untuk memakai jilbab, misalnya, dalam kondisi tertentu adalah pilihan kultural, selain

dalam kondisi yang lain boleh jadi merupakan ekspresi politik dan, tentu saja, kewajiban doktrinal agama. Dalam lingkup yang lebih luas, persoalan mengenai sampai sejauhmana pemerintah liberal diperkenankan menoleransi keberagaman ekspresi identitas keagamaan, yang sering berasosiasi dengan isu hak minoritas, telah menjadi bahan diskusi panjang dalam wacana multikulturalisme. Dalam banyak kasus, ekspresi identitas keagamaan, atau identitas-identitas lainnya yang mengacu pada eksistensi kelompok-kelompok minoritas, lebih sering merupakan pernyataan politik terhadap pola-pola hubungan kekuasaan antara masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas yang dijalankan sebuah pemerintahan (Kymlicka, 2003: 262).

Variasi penafsiran terhadap sekularisme, sebagaimana terjadi di Perancis, menunjukkan bahwa dalam kenyataannya tidak ada satupun masyarakat atau sistem politik Eropa yang benar-benar sekuler sebagaimana diumumkan kaum liberal (Parekh, 2006). Negara Eropa seperti Inggris bahkan mengakui adanya "gereja resmi" (*established church*) yang mempunyai "kewenangan tidak penuh" (*partial establishment*) dalam mengawal peran politik agama dalam ruang publik. Dalam hal ini, warisan Kristen masih mempengaruhi kosa-kata, pemahaman diri, lembaga-lembaga, cita-cita, dan praktik-praktik masyarakat dan sistem politik. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Inggris, pengaruh Kristen dalam kehidupan publik bukan melulu persoalan keagamaan, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari kepentingan politik kekuasaan. Pengakuan resmi negara terhadap sebuah bentuk organisasi keagamaan pada awalnya berasal dari persoalan pribadi. Berawal dari penolakan Paus untuk merestui pernikahan Henry VIII dengan Catherine of Aragon, Inggris mengakui adanya sebuah "gereja resmi" (*established church*) yang disebut Gereja Inggris (*the Church of England*), atau lebih dikenal sebagai Gereja Anglikan (An-Na'im, 2007).

Akan tetapi, harus diakui, praktik sekularisme ala Inggris, sebagaimana di Perancis, banyak menyimpan problem. Komunitas-komunitas agama di luar Gereja Anglikan sering merasa diperlakukan diskriminatif. Dalam soal pendidikan misalnya, meskipun pada 1988 pemerintah telah mengeluarkan sebuah undang-undang reformasi pendidikan yang bertujuan untuk menjamin agar pendidikan terbebas dari intervensi pandangan keagamaan tertentu, kenyataannya Gereja Anglikan melalui kewenangan komite lokal mempunyai hak veto untuk mengubah silabus kurikulum pendidikan agama yang diajukan oleh sekolah-sekolah swasta (An-Na'im, 2007).

Di Jerman, sekularisme tidak dimaknai sebagai paham anti-agama sebagaimana di Perancis. Di sana, *concern* terbesar dari sekularisme adalah penghancuran halang rintang antara dunia para rahib, bangsawan, kelas menengah, dan petani (Modood dan Katoryano, 2006). Dalam formasi negara Jerman modern yang menganut "korporatisme", eksistensi institusi-institusi keagamaan diakui oleh hukum publik dan seringkali memainkan peran

penting sebagai isu-isu publik. Meski demikian, kehidupan politik pada dasarnya tetap diletakkan pada konsensus negara sekuler dimana peran gereja, baik Katolik maupun Protestan, dilimitasi seminimal mungkin. Peran mereka lebih bersifat dukungan moral terhadap gerakan-gerakan politik yang berwatak sekuler. Menjelang peristiwa penghancuran Tembok Berlin pada 1989, peran gereja-gereja Protestan, misalnya, justru sangat aktif dalam menggerakkan publik untuk terlibat dalam gerakan tersebut.

Di beberapa negara Eropa lain, seperti Denmark dan Yunani, selain Inggris sebagaimana telah disebut di atas, sekularisme dimaknai secara longgar sebagai paham politik yang menerima keberadaan “gereja resmi” (*established church*). Sampai tingkat tertentu, kondisi yang sama terjadi juga di Belanda dan Jerman. Di dua negara yang disebut terakhir, negara secara aktif menyponsori sekolah-sekolah atau rumah ibadah yang dimiliki lembaga-lembaga denominasi gereja. Di Belanda, tradisi “pilarisasi” yang telah berakar dalam masyarakat sipil itu memungkinkan kelompok-kelompok keagamaan menggalang dana dan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Tujuan dari kelompok-kelompok keagamaan itu tidak melulu urusan peribadahan, tetapi juga meliputi aspek-aspek sosial dan politik yang luas. Melihat pengalaman Belanda, makna sekularisme tidak berarti peminggiran peran agama dalam ruang publik, tetapi bagaimana menempatkannya sebagai bagian dari hak warga negara yang tetap tunduk pada hukum publik yang bersifat sekuler.

Interpretasi dan penerapan sekularisme yang berbeda-beda di antara negara-Negara Eropa merupakan peluang yang bisa dimasuki oleh kaum Muslim untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik Eropa. Pengalaman Belanda dengan tradisi “pilarisasi”, misalnya, adalah kesempatan bagi komunitas-komunitas Muslim untuk menyejajarkan dirinya dengan komunitas-komunitas keagamaan lainnya (Mudzakkir, 2007: 36-51). Hal yang sama terjadi di negara-negara Eropa lain. Terutama pasca peristiwa 11 September 2001, pemerintah di beberapa negara Eropa semakin menunjukkan perhatiannya terhadap komunitas-komunitas Muslim dengan mengakomodasi beberapa kepentingan mereka dalam mengekspresikan identitas keagamaannya di ruang publik. Akan tetapi, seperti akan ditunjukkan nanti, perhatian besar pemerintah terhadap Muslim Eropa sebagian besar dilakukan di bawah judul kebijakan keamanan, bukan sebuah pemahaman yang menyeluruh terhadap kompleksitas hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum Muslim dengan tradisi dan sistem politik Eropa yang berkarakter sekuler.

Muslim Eropa sebagai Minoritas Migran

Meskipun beberapa komunitas Muslim telah datang dan tinggal di Eropa

sejak akhir abad ke-18, jumlah terbesar dari mereka berasal dari gelombang migrasi para pekerja pasca Perang Dunia II (Cesari, 2004). Faktor pendorong dan penarik mereka adalah ekonomi. Sementara mereka butuh mencari kehidupan yang lebih layak, negara-negara Eropa membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Didukung oleh bantuan keuangan yang besar dari Amerika Serikat lewat *Marshall Plan*, negara-negara Eropa mampu mengaktifkan kembali faktor produksi mereka yang tersisa. Di luar perkiraan, negara-negara Eropa dengan cepat tampil kembali menjadi pemain-pemain penting dalam percaturan ekonomi Pasca Perang. Jerman, misalnya, negara yang kalah perang sehingga sebagian besar infrastruktur industrinya berantakan, justru tampil dengan "*economic miracle*" yang mengagumkan (Vitols, 2005).

Boom ekonomi Eropa Pasca Perang ini, seperti telah disebut di atas, tentu membutuhkan dukungan tenaga kerja yang banyak dan murah. Untuk mengatasinya, negara-negara Eropa mendatangkan para pekerja dari negeri-negeri yang ternyata mempunyai hubungan di masa lalu.³ Inggris, misalnya, "mengundang" para pekerja dari India dan Pakistan, Prancis dari Maroko dan Tunisia, Jerman dari Turki, Belanda dari Suriname. Negara-negara Eropa tersebut membuat kesepakatan resmi dengan pemerintah negara-negara pengirim tenaga kerja tersebut: Perancis dengan Maroko dan Tunisia pada 1963 dan dengan Aljazair pada 1968, Jerman dengan Turki dan Maroko pada 1963 dan dengan Tunisia pada 1965.

Dalam perkembangannya, kaum migran yang datang ke Eropa Pasca Perang terbagi ke dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama datang ke Eropa pada tahun 1950an. Mereka adalah "para pekerja tamu" (*guest workers*), hampir semuanya lelaki, banyak diantaranya masih bujangan, yang awalnya diharapkan akan kembali pulang. Akan tetapi, dalam kenyataannya, harapan itu tidak pernah jadi kenyataan, bahkan disaat Eropa mengalami krisis ekonomi pada 1970an. Justru pada saat itulah gelombang kedua kaum migran datang. Inilah periode yang sering disebut "reunifikasi keluarga". Keluarga para buruh gelombang pertama datang berbondong-bondong menyusul sanak saudara mereka di Eropa. Sementara itu, gelombang ketiga adalah generasi terakhir yang datang ke Eropa sejak 1980an sampai sekarang. Sebagian besar dari mereka adalah para pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan imigrasi yang masih longgar dan kejatuhan rezim Soviet pada akhir tahun 1980an adalah dua faktor penting yang mendorong arus migran gelombang ketiga itu. Jerman adalah salah satu negara yang terkena dampak paling besar dari kedatangan kaum migran gelombang ketiga itu.

3 Selain Jerman, negara-negara Eropa lainnya mempunyai hubungan kolonial di masa lalu dengan negeri-negeri darimana para pekerja migran itu berasal. Khusus Jerman, hubungannya dengan Turki, negeri asal terbesar migran yang bekerja di sana, lebih bersifat hubungan politik ketika dua negara tersebut terlibat aliansi pada masa-masa sekitar Perang Dunia I

Antara tahun 1980 dan 1990, 60.000 orang Afganistan, 111.000 orang Iran, dan 55.000 orang Libanon datang dan menetap di sana. Selain itu, terdapat juga para pengungsi dari Bosnia yang jumlahnya mencapai 340.000.

Sebagian besar kaum migran yang datang ke Eropa adalah Muslim. Meski diperkirakan jumlah mereka semakin besar dari tahun ke tahun, tidak ada data yang pasti mengenai itu. Sensus di negara-negara Eropa yang tidak memasukkan kategori agama membuat informasi mengenai jumlah kaum Muslim selalu bersifat perkiraan. Kaum migran yang berasal dari negara-negara Muslim diidentifikasi sebagai Muslim. Dengan cara seperti ini, jumlah kaum Muslim di Eropa sekarang diperkirakan lebih dari 10 juta orang atau 3 % dari populasi Eropa. Sebagian kalangan meyakini bahwa jumlah sesungguhnya adalah dua kali lipat dari itu. Dengan perkiraan jumlah sebesar itu, Islam adalah agama minoritas terbesar dan menjadi agama ketiga terbesar di Eropa. Negara-negara Eropa berikut ini secara berurutan adalah tempat dimana sebagian besar kaum Muslim tinggal: Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Yunani. Di negara-negara tersebut, jumlah populasi Muslim mencapai 4-7 % dari populasi penduduk secara keseluruhan. Secara umum mereka berasal dari tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah keturunan Turki dan Kurdi. Di Jerman, jumlah mereka sekitar 2,5 juta orang. Kelompok kedua adalah keturunan Maroko. Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah mereka di Eropa, tetapi di Perancis saja jumlah mereka diperkirakan sebanyak 3 juta orang. Kelompok ketiga adalah keturunan Asia Selatan. Karena adanya hubungan kolonial, sebagian besar dari kelompok ini tinggal di Inggris.

Sebelum dekade 1970an, eksistensi kaum Muslim di Eropa belum menjadi bahan diskusi yang penting dalam kehidupan politik. Sebagian besar dari mereka hanya dianggap sebagai pekerja dengan status kewarganegaraan bukan warganegara. Area permukiman mereka masih terbatas di barak-barak yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja. Akan tetapi, keadaan berubah setelah terjadi "reunifikasi keluarga" besar-besaran pada tahun 1970an. Jumlah kaum migran, yang sebagian besarnya adalah Muslim, semakin banyak. Akibatnya, area permukiman mereka meluas. Mereka tidak lagi tinggal di barak-barak, tetapi menyebar ke lingkungan permukiman masyarakat Eropa. Perubahan inilah yang mendorong pemerintah di beberapa negara Eropa mulai memikirkan bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam sistem dan kultur masyarakat Eropa. Memasuki dekade 1980, isu mengenai integrasi kaum migran Muslim di Eropa ini telah menjadi bahan diskusi politik penting, apalagi setelah beberapa kekuatan partai politik Islam garis keras di Aljazair dan Turki meraih suara signifikan dalam pemilihan umum. Sebagian kalangan khawatir terhadap meluasnya pengaruh Islam garis keras terhadap kaum migran Muslim di Eropa (Cesari, 2004).

Meluasnya area persebaran permukiman kaum Muslim di tengah-tengah lingkungan masyarakat Eropa telah menimbulkan beberapa kontroversi. Salah satunya adalah menyangkut inisiatif kaum Muslim untuk mendirikan rumah ibadah. Seiring dengan semakin banyaknya populasi Muslim, keinginan untuk membangun rumah ibadah (*prayer rooms*) meningkat dengan pesat sejak 1970an. Sampai akhir 1990an, tercatat lebih dari 6.000 masjid telah berdiri di seantero Eropa Barat. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah masjid itu, aktifitas-aktifitas keagamaan berlangsung dengan intensif dan ekstensif. Simbol-simbol keagamaan Islam, sebagai akibatnya, dapat ditemukan dengan mudah di jalan-jalan dan permukiman di kota-kota di Eropa. Selain masjid, beberapa simbol dan penanda keislaman lainnya bermunculan, seperti kuburan Muslim, restoran halal, bank syariah, dan sekolah agama (Smith, 2002).

Bagi sebagian kalangan, kehadiran simbol-simbol yang mengacu pada identitas keagamaan Islam di ruang publik Eropa adalah tantangan serius terhadap masa depan sekularisme. Meskipun sebagian dari kaum Muslim telah tercatat sebagai warganegara (*citizen*), banyak kalangan dalam masyarakat Eropa yang meragukan kesetiaan mereka terhadap hukum-hukum dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Loyalitas kaum Muslim terhadap "*ummah*" dianggap menegasikan patriotisme kaum Muslim terhadap negara Eropa dimana mereka tinggal sekarang. Pandangan-pandangan stereotipikal dan stigmatis inilah yang sering menjadi beban dalam menciptakan sebuah pola hubungan yang dialogis antara "Islam" dan "Eropa". Menurut Parekh, pandangan-pandangan tersebut berakar pada kesalahpahaman masyarakat Eropa sendiri dalam memaknai logika integrasi, seolah-olah identitas-identitas yang sekarang dianggap *embedded* dalam tradisi masyarakat Eropa seperti liberalisme, sekularisme, dan rasionalisme adalah konsepsi yang tunggal (Parekh, 2006).

Dari "Integrasi" ke "Akomodasi"

Akomodasi terhadap praktik-praktik keagamaan Islam adalah salah satu isu politik penting dalam konstelasi politik negara-negara Eropa Barat sekarang. Kehadiran kaum Muslim di tengah-tengah mereka adalah kenyataan yang tidak mungkin ditolak lagi. Akan tetapi, seperti juga sekularisme, persoalan akomodasi mempunyai tipe dan karakter berlainan antara satu negara dengan negara lain. Hal yang sama terjadi di dalam dinamika internal masing-masing negara. Kelompok yang "*strict*" menganjurkan bahwa negara sebaiknya hanya mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok agama yang telah menjadi bagian dari "*the original establishment*", sedangkan kelompok yang lebih "*soft*" berpendapat bahwa akomodasi negara harus mencakup semua kelompok agama (Fetzer dan Soper, 2005).

Konsep akomodasi jelas lebih bersifat positif daripada konsep integrasi dan, apalagi, asimilasi. Jika kedua konsep terakhir lebih menempatkan kaum Muslim sebagai objek, konsep akomodasi, sebaliknya, menempatkan kaum Muslim sebagai subjek. Konsep ini lahir dari kenyataan bahwa sebagian besar kaum Muslim Eropa sekarang adalah warganegara dari salah satu negara di Eropa. Mereka ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan kewarganegaraan pada umumnya. Mereka ikut memilih dalam pemilihan umum dan bahkan beberapa dari mereka terpilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Mereka juga banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Kehidupan mereka secara sosial dan ekonomi dapat disebut cukup layak. Berdasar kenyataan seperti ini, pengakuan terhadap identitas keagamaan Muslim jelas bukan sesuatu yang dapat ditawar-tawar lagi (Klausen, 2005).

Dalam praktiknya, politik akomodasi negara terhadap Muslim di Eropa sangat berkait dengan pola hubungan agama-gereja di negara bersangkutan (Klausen, 2005). Perancis dengan *laicite*-nya mempunyai tipe dan karakter akomodasi yang berbeda dengan Inggris dan Jerman. Khususnya di Jerman, posisi agama, seperti telah disinggung di atas, adalah bagian dari “korporatisme” negara. Oleh karena itu, kaum Muslim sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan *korperschaft des öffentlichen rechts*, semacam hak untuk mendapatkan dana publik, dari pemerintah sebagaimana didapatkan oleh kelompok-kelompok keagamaan lain seperti Kristen dan Yahudi. Sementara itu, Belanda dengan tradisi “pilarisasi”-nya, secara teoritis, barangkali adalah negara yang paling siap menerima kehadiran Islam sebagai “pilar” kelima dalam kehidupan *civil society* mereka.⁴ Dengan adanya tradisi “pilarisasi” ini, kaum Muslim berhak untuk mengakses dana publik yang juga dinikmati oleh kelompok-kelompok agama lain.

Akan tetapi, dalam konteks Eropa pasca 11 September 2001, politik akomodasi negara terhadap Muslim berangkat dari kerangka berpikir kebijakan keamanan yang sempit. Islam dan kaum Muslim dipahami sebagai ancaman. Keterlibatan beberapa orang yang diidentifikasi sebagai Muslim dalam beberapa aksi anarkis dilihat secara simplistis sebagai bukti keterkaitan Islam dan terorisme. Stereotip dan stigma ini menjadi citra yang kuat dalam benak pemerintah di negara-negara Eropa dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan Islam dan kaum Muslim. Dengan kerangka seperti ini, politik akomodasi diluncurkan pemerintah untuk “*separate the extremists from the faith*”.⁵ Pemberian dana terhadap sekolah-sekolah Islam, misalnya, dilandasi asumsi bahwa selama ini sekolah-sekolah itu mengajarkan nilai-nilai

4 “Pilar” lainnya adalah Protestan, Katolik, Liberal, dan Sosialis

5 Pernyataan ini dilontarkan Ian Blair, kepala polisi metro London, ketika mengomentari kebijakan negara yang mendanai sejumlah sekolah swasta Islam. Lihat, Jytee Klausen, “Counterterrorism, integration of Islam in Europe”, <http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=6950>, diakses 28 Februari 2008

yang cenderung mendorong anak didik untuk terlibat dalam aksi-aksi radikal. Akan tetapi, tidak ada tindak lanjut yang lebih substantif untuk, misalnya, mendorong anak didik di sekolah-sekolah Islam agar terlibat dalam forum dialog antar agama. Akibatnya, segregasi antar kelompok agama masih terus berlangsung dan bahkan, sampai tingkat tertentu, semakin diperkuat.

Kesalahpahaman yang mendasari politik akomodasi negara terhadap Muslim di Eropa dinilai Amartya Sen merupakan akibat dari kesalahpahaman orang dalam memaknai konsep “multikulturalisme” (Sen, 2007: 201-207). Pemahaman mengenai Muslim sebagai kaum minoritas, sebagai turunan dari konsep multikulturalisme, seringkali hanya ditempatkan dalam kerangka politik pengakuan terhadap identitas keagamaannya saja, tidak meliputi identitas-identitas lainnya. Padahal, menurut Sen, seorang Muslim pastilah hidup dalam sekian identitas yang boleh jadi pada suatu waktu akan bertabrakan dan bertindihan. Pengakomodasian terhadap satu identitas tetapi mengabaikan identitas lain merupakan bentuk “monokulturalisme majemuk” yang tidak akan membantu menciptakan hubungan yang saling pengertian antara berbagai komunitas agama dalam sebuah masyarakat yang multikultur (Sen, 2007).

Penutup

Tulisan ini hanyalah sebuah sketsa pemahaman terhadap semesta persoalan yang kompleks di sekitar isu sekularisme dan kaum Muslim di Eropa. Oleh karena itu, sebuah kesimpulan yang solid tampaknya akan sulit tercapai, apalagi kalau mengingat betapa dinamisnya diskusi-diskusi tentang Islam dalam percaturan politik global sekarang ini. Lebih dari sekadar diskusi akademis, isu mengenai Islam telah menjadi konsumsi para pengambil kebijakan di hampir seluruh negara di dunia. Akan tetapi, Islam dalam konteks yang terakhir ini sering ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang terbatas, dilepaskan dari lingkaran-lingkaran rumit yang mengitarinya.

Kaum Muslim Eropa terdiri dari berbagai komunitas yang datang dari beragam latar belakang ras, etnis, bangsa, kelas, gender, dan sebagainya. Keragaman itu telah membentuk “identitas-identitas”, bukan hanya “satu identitas”, dalam diri seorang Muslim. Posisi dan status sebagian Muslim Eropa sebagai kaum migran, misalnya, yang secara sosial dan ekonomi menghadapi beberapa persoalan, adalah fakta yang tidak bisa dilupakan ketika memahami bagaimana respon mereka terhadap lanskap Eropa yang secara “esensial” digambarkan berbeda dengan asal usul dan latar belakang mereka. Respon yang mereka berikan boleh jadi tidak sepenuhnya didasarkan pada identitas keagamaan, tetapi juga berkait dengan tempat atau negara dimana mereka tinggal sekarang. Seperti telah ditunjukkan oleh tulisan ini, masing-masing negara di Eropa mempunyai keragaman dalam hal bagaimana

menginterpretasi dan mempraktikkan sekularisme dalam kebijakan publik. Keragaman ini tentu saja memberikan peluang dan tantangan bagi Muslim Eropa untuk terus menerus menegosiasikan identitasnya di tengah berbagai perubahan yang seringkali datang di luar kontrol mereka. ●

Referensi

- Akar, Phil. Lic. Ahmed. 2006. "Islam in Europe: Problem and Prospect of Integration", International Seminar hosted by the International Center for Islam and Pluralism (ICIP) and Finland Embassy, Jakarta. November 22-23.
- An-Nai'm, Abdullahi Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Syariah*. Bandung: Mizan.
- Cesari, Jocelyne. 2004. *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*. New York: Partridge Macmillan.
- De Master, Sara dan Michael K. Le Roy. 2000. "Xenophobia and European Union", *Comparative Politics*, Vol. 32, No. 4, Juli.
- Fetzer, Joel S. dan J. Christopher Soper. 2005. *Muslims and the State in Britain, France, and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jacoby, Wade dan Hakan Yavuz. 2008. "Modernization, identity and integration: an introduction to the special issue on Islam in Europe", *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 28, No. 1, April.
- Kastoryano, Riva. 2006. "French Secularism and Islam: France's Headscarf Affair" dalam Tariq Modood, Richard Zapata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou (Ed.). *Multiculturalism, Muslims, and Citizenship: A European Approach*. London: Routledge.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Klausen, Jytte. 2005. *The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe*. New York: Oxford University Press.
- Klausen, Jytte. 2008. "Counterterrorism, integration of Islam in Europe", <http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=6950>, diakses 28 Februari.
- Modood, Tariq dan Rita Kastoryano. 2006. "Secularism and Accomodation of Muslims in Europe" dalam Tariq Modood, Richard Zapata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou (Ed.). *Multiculturalism, Muslims, and Citizenship: A European Approac*. London: Routledge.
- Mudzakkir, Amin. 2007. "Minoritas Kaum Migran Muslim di Belanda", *Jurnal Kajian Wilayah Eropa*, Vol. III, No. 3.
- Noor, Farish A. 2006. "Riwayat sebuah kata kotor" dalam Novriantoni (Ed.). *Sepatah "Kata Kotor": Sekularisme di Asia*. Jakarta: Yayasan Kalam.
- Parekh, Bikhu. 2006. "Europe, liberalism, and 'Muslim question'" dalam Tariq Modood, Richard Zapata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou

- (Ed.). *Multiculturalism, Muslims, and Citizenship: A European Approach*. London: Routledge.
- Parekh, Bikhu. 2006. "Europe, Liberalism, and the 'Muslim Question'" dalam Tariq Modood, Richard Zapata-Barrero, dan Anna Triandafyllidou (Ed.). *Multiculturalism, Muslims, and Citizenship: A European Approach*. London: Routledge.
- Sen, Amartya. 2007. *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*, terj. Arif Susanto. Jakarta: Marjin Kiri.
- Smith, Jane I. 2002. "Introduction", Yvonne Yazbeck Haddad (Ed.). *Muslims in the West: From Sojourners to Citizens*. New York: Oxford University Press.
- van Bruinessen, Martin. 2006. "The Emergence of Islamophobia in the Netherlands", International Seminar hosted by the International Center for Islam and Pluralism (ICIP) and Finland Embassy, Jakarta. November 22-23.
- Vasta, Ellie. 2007. "From ethnic minorities to ethnic majority policy: Multiculturalism and the shift to assimilationism in the Netherlands". *Ethnic and Racial Studies* Vol. 30 No. 5 September.
- Vitols, Sigurt. 2005. "Globalization and the Transformation of the German Model" dalam R. Stubbs and G. Underhill (Ed.). *Political Economy and the Changing Global Order*, 3rd edn. Oxford: Oxford University Press.